

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asyhadie, Z. (2015). *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Azhar, M. (2015). *Hukum Ketenagakerjaan*. Buku Ajar.
- Budiono, A. R. (1999). *Hukum Perburuhan Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Harahap, A. M. (2023). *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- HR, Ridwan. (2014). *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Husni, L. (2016). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khairani, (2021). *Pengantar Hukum Perbutruhan Dan Ketenagakerjaan: Disesuaikan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja/Omnibus Law*, Edisi Revisi. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Khakim, A. (2003). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prints, D. (2000). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pujiatuti, E. (2008). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang: Semarang University Press Semarang.

- Purwana, A. E. (2016). *Keadilan Pendekatan Ekonomi Islam Teori, masalah, dan kebijakannya*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2016.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasyid, A. S (2021). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus. Edisi Kedelapan*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, M. Agus. (2014). *Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cetakan Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Situmorang, B. (2019). *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Menghimpun dan mengetahui Pendapat Ahli Mengenai Pengertian Sumber-Sumber Hukum Mengenai*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham.
- Soedarjadi, (2008). *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Soekanto, S, & Sri Mamudji. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soepomo, I. (2003). *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Susanti, D. (2020). *Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jember: Pustaka Abadi.
- Syaharti Endah, Ani Yumarni, dkk. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebijakan Upah*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

- Triningsih, A. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan Kebijakan dan Perlindungan Tenaga Kerja dalam Penanaman Modal Asing*. Depok: PT. RajaGrafindo.
- Ugo dkk. 2012. , *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tata Cara Dan Proses Penyelesaian Sengketa Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Uwiyono Aloysius, Siti Hajati Hoesin, dkk. (2018). *Asas-Asas Hukum Perburuhan: Edisi Kedua*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, Depok.

Skripsi

- Dian Firdaus. 2016. “*Tinjauan Yuridis Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada Pengadilan Hubungan Industrial (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 83k/Pdt.sus-PHI/2015)*”. Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang.

Jurnal

- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 368780.
- Fios, F. (2012). Keadilan hukum Jeremy Bentham dan relevansinya bagi praktik hukum kontemporer. *Humaniora*, 3(1), 299-309.
- Hendrawati, D., & Suhartoyo, J. M. P. M. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/buruh Wanita Dalam Hubungan Kerja Dengan Perusahaan Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

- Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pada PT. Sido Muncul). *Diponegoro Law Review*, 5(4), 1-12.
- Kahfi, A. (2016). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 3(2), 59-72.
- Khoe, F. N. (2013). Hak pekerja yang sudah bekerja namun belum menandatangani perjanjian kerja atas upah ditinjau berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. *Calyptra*, 2(1), 1-12.
- Leonardy, J. (2023). Eksistensi Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) Dalam Konteks Indonesia Sebagai Negara Hukum Kesejahteraan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 5288-5298.
- Lestari, P., Sunarto, S., & Cahyono, H. (2020). Implementasi nilai-nilai pancasila pada sila kelima dalam pembelajaran. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 7(2), 130-144.
- Manik, J. M. P., & Dewi Hendrawati, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Wanita Dalam Hubungan Kerja Dengan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus pada PT. Sido Muncul). *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-12.

- Murni, S., Alfa, M. Z., & Roring, F. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan pada PT. PLN (Persero) Rayon Manado Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), 2898.
- Muhtadi. 2012. Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia, *Viat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 2(4) 4 No. 2:12.
- Nurchahyo, N. (2021). Perlindungan hukum tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 69-78.
- Nuraeni, D. N., Rizal, M., & Natari, S. U. (2023). Langkah Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Sepihak Serta Upaya Perlindungan Pekerja Studi Kasus Pt. Kaldu Sari Nabati Indonesia. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(3), 166-178.
- Nofita, D., dkk.. (2019). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Perlindungan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri (Studi Di Dinar Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo). *Diponegoro Law Journal*, 8(3), 1953-1968.
- Rohmat Taufik, dkk. 2020. Analisis dan Desain Sistem Pengambilan Keputusan Pengangkatan Karyawan tetap di PT Aerofood ACS,” *Jurnal Teknologi Sistem Informatika dan Aplikasi*, 3 (3, 158–164
- Samudra, D., & Hibar, U. (2021). Studi Komparasi Sahnya Perjanjian Antara Pasal 1320 KUH Perdata Dengan Pasal 52 Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 26-38
- Sayuti, S. (2013). Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif). In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 13, No. 02, pp. 1-22).
- Singadimendja Holy. 2017. Kedudukan Perjanjian Bersama (PB) Terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Dalam Hubungan Industrial, *Jurnal Akta Yudisia*, 1(2) 2: 3.
- Sinaga, N. A., & Zaluchu, T. (2021). Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Jurnal Teknologi Industri*, 6.
- Setiawan Tommy, dkk. 2021. Asas Keseimbangan Sebagai Indikator Keadilan di Dalam Perjanjian Baku, *Notarius* 2(14): 3
- Sri Hidayani, dkk. 2018.bAspek Hukum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang Dilakukan Oleh Pengusaha, *Jurnal Magister Hukum UMA* 2(11) 11: 4.
- Suhartoyo, S. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 326-336.
- Suhartoyo, S. (2020). Perlindungan Hukum Mengenai Pengupahan Terhadap Pekerja/Buruh Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(3), 494-503.

Taufik, M. (2013). Filsafat John Rawls tentang teori keadilan. *Mukaddimah:*

Jurnal Studi Islam, 19(1), 41-63.

Wahid, A. A. (2017). Kedudukan Hukum Administrasi Negara Dalam Tata

Hukum Indonesia. *Jurnal Sosial dan Humanis Sains (JSHS)*, 2(1).

Wibowo, R. F., & Herawati, R. (2021). Perlindungan bagi pekerja atas

tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak. *Jurnal*

Pembangunan Hukum Indonesia, 3(1), 109-120.

Wijaya, A., Solechan, S., & Suhartoyo, S. (2022). Analisis Yuridis

Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Undang-undang

Ketenagakerjaan Setelah Pengesahan Undang-undang Cipta

Kerja. *Diponegoro Law Journal*, 11(2).

Zulkarnaen Hunaeni, Ahmad. 2017. Penyuluhan Tentang Tata Cara

Membuat Peraturan Perusahaan Di PT. Pelangi Warna Kreasi

Bandung. *Journal of Empowerment*, 1(1), 39-48.

Artikel/Website

Arofah, Lailatul. 2022. Konstanting Sebagai Pintu Pertama Bagi Hakim

Dalam Menegakkan Keadilan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Direktorat Jendral Badan Pengadilan Agama (April,

2022),<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konstatirng-sebagai-pintu-pertama-bagi-hakim-dalam-menegakkan>.

Badan Pusat Statistik. Jumlah Angka Kerja (Jiwa), 2022-2023. Badan Pusat

Statistik.

<https://semarangkota.bps.go.id/id/statisticstable/2/MTk3IzI=/jumlah-angkatan-> November 21, 2023.

Safa'at, M. A. (2011). Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls). <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf>, 1.

Sibagariang, F. A., dkk.dsd (2023, October). Gambaran Pekerja Informal dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya di Indonesia Tahun 2022. In *Seminar Nasional Official Statistics* (Vol. 2023, No. 1, pp. 151-160).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Peraturan Kementrian Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara
Pengesahan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Bersama.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 100 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem
Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

LAMPIRAN

Lampiran 1 (surat permohonan riset)

 **KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM**

Jalan dr. Antonius Suryo
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201
Laman: www.fh.undip.ac.id, Pos-el: fh[at]live.undip.ac.id

Nomor : 568 /UN7.F1/AK/II/2025
Lamp. :
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

24 FEB 2025

Yth. Kepala Disnaker Kota Semarang
Jl. Ki Mangunsarkoro No.21, Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50136.

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan penulisan hukum (skripsi) sesuai dengan kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

nama : Dinara Ayu Trisnaninggar
NIM : 11000121140641
alamat : Jl. Garuda Nomor 16 (Asrama Cpm), Kota Semarang
nomor HP : 082227000762
bidang minat : Hukum Administrasi Negara
judul skripsi : Analisis Kasus Pemutusan Hubungan Kerja Di PT. Ardina Prima Semarang Ditinjau dari Peraturan Ketenagakerjaan di Indoensia (Studi Tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas Kesalahan Pekerja yang Melakukan Modifikasi Sarana Transportasi Perusahaan Tanpa Izin)

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.


Prof. Dr. Netno Saraswati, S.H., M.Hum. W
NIP 196711191993032002

Lampiran 2 (Surat jawaban riset)



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS TENAGA KERJA

Jalan Ki Mangusarkoro No 21 Telepon (024) 8440335, 8440339 SEMARANG

Nomor : B/328/400.14.5.4/III/2025
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Surat Jawaban Permohonan Riset/Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro Semarang
di -
Semarang

Sehubungan dengan Surat Permohonan Riset/Penelitian Nomor :
568/UN7.F1/AK/II/2025 tanggal 24 Februari 2025 yang diajukan kepada kami oleh
Mahasiswa atas nama:

Nama : Dinara Ayu Trisnaninggar
NIM : 11000121140641
Program Studi : Ilmu Hukum , S1
Judul Tugas Akhir : **"Analisis Kasus Pemutusan Hubungan Kerja di PT.
Ardina Prima Semarang Ditinjau dari Peraturan
Ketenagakerjaan di Indonesia (Studi Tentang Pemutusan
Hubungan Kerja atas Kesalahan Pekerja yang Melakukan
Modifikasi Sarana Transportasi Perusahaan Tanpa Izin)"**

Dengan ini kami memberi Izin kepada Mahasiswa tersebut di atas untuk melakukan
Penelitian yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

03 Maret 2025
Kepala,



Dr. SUTRISNO, S.KM, MH.Kes
Pembina Utama Muda/IV-c
NIP 196802281994031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara